# PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN BERMASALAH OLEH DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi**
**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta**
**untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat**
**Memperoleh Gelar Sarjana Strata I**


Oleh:
Ah. Sholahuddin
NIM 11250054

Pembimbing:
Asep Jahidin, S.Ag, M.Si.
NIP. 197508302006042001


**JURUSAN ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL**
**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**
**YOGYAKARTA**

**2016**

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856 Fax. (0274) 552230 Yogyakarta 55281

# PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : Un.02/DD/PP.00.9/01/2016

Tugas Akhir dengan judul : PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL BAGI PEKERJA MIGRAN BERMASALAH OLEH DINAS SOSIAL DAAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : AH. SHOLAHUDDIN
Nomor Induk Mahasiswa : 11250054
Telah diujikan pada : Kamis, 09 Juni 2016
Nilai ujian Tugas Akhir : B+

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

## TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Asep Jahidin, S.Ag., M.Si
NIP. 19750830 200604 1 002

Penguji II

Andayani, SIP, MSW
NIP. 19721016 199903 2 008

Penguji III

Siti Solechah, S.Sos.I., M.Si
NIP. 19830519 200912 2 002

Yogyakarta, 09 Juni 2016
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah dan Komunikasi
DEKAN

Dr. Nurjannah, M.Si.
NIP. 19600310 198703 2 001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 515856
Yogyakarta 55281

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Kepada:
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Ah. Sholahuddin
NIM : 11250054
Judul Skripsi : "Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah Oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta"

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 29 Mei 2016
Pembimbing

Asep Jahidin, S.Ag. M.Si.
NIP. 197508302006042001

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial

Arif Maftuhin, M. Ag. MAIS
NIP: 19740202 200112 1 002

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ah. Sholahuddin
NIM : 11250054
Program Studi : Ilmu Kesejahteraan Sosial
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi

menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: **"Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah Oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta"** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali bagian-bagian tertentu yang penyusun ambil sebagai acuan dengan tata cara yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila terbukti pernyataan ini tidak benar, maka penyusun siap mempertanggungjawabkannya sesuai hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Maret 2016
Mhs. pembuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
TGL. 20
37ABEADF613552631
6000
ENAM RIBU RUPIAH

**Ah. Sholahuddin**
**NIM: 11250054**

# HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

Kedua orang tua yang saya banggakan, Bapak Sudirlan dan Ibu Asmi'ah

Adik-adikku yang tersayang Kholid Anwar dan Dhohikatul Mustabsiroh

# MOTTO

..... وَلا تَيْأَسُوا مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِنَّهُ لَا يَيْئَسُ مِنْ رَوْحِ اللَّهِ إِلا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ.

Artinya

.... jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya yang berputus asa dari rahmat Allah, hanyalah orang-orang yang kafir. (Q.S. Yusuf : 87)

# KATA PENGANTAR

بســـم الله الرحمـــن الرحيـــم

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji Syukur atas Rahmat Allah Yang Maha Kuasa. Hanya atas berkat Rahmat-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Waktu yang memburu serta dukungan semangat dari orang-orang terdekat menjadi pemacu penyusun untuk segera menyelesaikannya. Tidak lupa shalawat serta salam untuk junjungan kita, kekasih tercinta: Nabi Muhammad SAW, sosok sempurna yang jasanya begitu besar bagi umat Islam. Cinta kasih dan pengorbanannya begitu besar, pengorbanan serta perjuangannya lah yang memberi semangat pada penyusun untuk tidak menyerah dalam berjuang.

Dalam proses penyelesaian skripsi ini telah banyak melibatkan jasa dari berbagai pihak, yang tidak terukur nilai keikhlasannya. Hanya secuil kalimat terima kasih yang penyusun dapat sematkan sebagai tanda silaturrahmi, kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penyusun untuk dapat mengeyam pendidikan di Perguruan Tinggi ini.
2. Ibu Dr. Nurjanah, M.Si., selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Bapak Arif Maftuhin, M.Ag, MAIS selaku Ketua Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial UIN Sunan Kalijaga

Yogyakarta yang telah memberikan fasilitas perkuliahan dan juga memberikan ijin penelitian.

3. Bapak Arif Maftuhin, M.Ag MAIS. selaku Penasihat Akademik yang selalu mengarahkan penyusun dalam segala hal yang menyangkut perkuliahan.
4. Bapak Asep Jahidin, S.Ag, M.Si. selaku pembimbing skripsi, yang senantiasa bersabar dalam membimbing dan mengarahkan penyusun demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Seluruh pengurus Tata Usaha (TU) dan staff jurusan IKS Fakultas Dakwah dan Komunikasi, terutama Bapak Sudarmawan yang telah membantu dan memperlancar dalam proses penyusunan skripsi.
6. Seluruh staff pengajar Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, khususnya untuk seluruh dewan pengajar Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial yang telah ikhlas membekali berbagai ilmu dalam bidang Ilmu Kesejahteraan Sosial yang tidak ternilai harganya. Kerelaan mereka semua adalah kunci keberkahan ilmu yang kami peroleh.
7. Bapak Budhi selaku Kepala Seksi Korban Tindak Kekerasan, pekerja migran dan jaminan sosial, ibu Tari selaku Pendamping pekerja migran Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta.
8. Ibu Asmi'ah serta bapak Sudirlan orang tua tercinta, adik-adikku Hika (tata), Kholid yang telah memberikan sindiran, motivasi, dukungan serta saran dan doa selama ini.
9. Terakhir, seluruh sahabat dan teman-teman dari desa Pasucen, Trangkil, Pati dan teman-teman jurusan IKS yang begitu banyaknya sehingga tak mungkin

disebutkan satu persatu selalu memberikan saran-saran, motivasi, semangat, ide-ide dan masukan selama ini.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi peneliti pribadi dan umumnya pada semua pembaca. Semoga Allah SWT melimpahkan segala rahmat dan taufiq-Nya sebagai balasan atas segala keikhlasannya. Curahan kenikmatan hidup, kesejahteraan kalbu dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Hanya doa yang dapat penyusun berikan semoga bermanfaat.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 29 Mei 2016
Penulis

Ah. Sholahuddin

NIM: 11250054

# ABSTRAK

Ah. Sholahuddin : Pelayanan Kesejahteraan Sosial bagi Pekerja Migran Bermasalah Oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Skripsi. Yogyakarta; Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2016.

Usaha pemerintah dalam melakukan perlindungan dan jaminan sosial tercipta dengan memberikan pelayanan terbaik kepada semua pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial tak terkecuali pekerja migran bermasalah di daerah istimewa Yogyakarta yang merupakan salah satu tempat debarkasi pekerja migran dari 12 tempat debarkasi di seluruh Indonesia. Kepulangan pekerja migran diupayakan oleh berbagai kementrian untuk melakukan perlindungan hingga ke kampung halaman mereka masing-masing. Setelah itu, menjadi tugas bagi dinas sosial untuk melakukan pemberdayaan melalui pelayanan kesejahteraan sosial kepada pekerja migran bermasalah.

Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana permasalahan yang dialami pekerja migran bermasalah di daerah istimewa Yogyakarta dan bagaimana pelayanan kesejahteraan sosial yang dilakukan oleh dinas sosial daerah istimewa Yogyakarta. Melalui penggunaan teori pelayanan kesejahteraan sosial, penelitian dilakukan dengan wawancara mendalam dan dokumentasi kepada kepala seksi korban tindak kekerasan, pekerja migran bermasalah dan jaminan sosial (KTK-PM dan Jamsos), pendamping pekerja migran bermasalah, dan pekerja migran bermasalah.

Pelayanan yang dilakukan oleh dinas sosial ini sendiri dilaksanakan oleh seksi korban tindak kekerasan, pekerja migran dan jaminan sosial di bawah bidang bantuan dan jaminan sosial. Bentuk pelayanannya adalah pemulangan, penampungan dan perawatan di RPTC, dan pemberian bantuan UEP yang prosesnya dibagi dalam beberapa tahap pelayanan. Tahap awal berupa kontak, intek, kontrak, asesmen dan perencanaan intervensi, tahap intervensi berupa pemulangan, rujukan RPTC dan bantuan UEP, terakhir tahap terminal berupa pengakhiran hubungan layanan.

Secara keseluruhan dinas sosial telah melakukan pelayanan yang baik kepada pekerja migran bermasalah dengan pemulangan, menyalurkan UEP (Usaha Ekonomi Produktif), dan rujukan ke RPTC. Beberapa yang berdasar penelitian ini perlu dilakukan perbaikan adalah proses terminasi yang dilakukan berdasarkan batasan waktu tiap tahun serta masih kurangnya pengetahuan masyarakat yang akan program yang bisa didapat pekerja migran bermasalah.

Kata Kunci : Pelayanan, Kesejahteraan sosial, pekerja migran bermasalah, Dinas Sosial

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL ..... i
HALAMAN PENGESAHAN ..... ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI ..... iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ..... v
MOTTO ..... vi
KATA PENGANTAR ..... vii
ABSTRAK ..... x
DAFTAR ISI ..... xi
BAB I PENDAHULUAN ..... 1
A. Latar belakang masalah ..... 1
B. Rumusan Masalah ..... 6
C. Tujuan Penelitian ..... 6
D. Manfaat Penelitian ..... 7
E. Kajian pustaka ..... 7
F. Kajian Teori ..... 11
G. Metodologi Penelitian ..... 20
H. Sistematika Penulisan ..... 25
BAB II GAMBARAN UMUM DINAS SOSIAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA ..... 27
A. Profil Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta ..... 27
1. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta ... 27
2. Visi dan Misi Dinas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta ..... 29
3. Susunan Organisasi Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta ..... 30
B. Profil Seksi Korban Tindak Kekerasan, Pekerja Migran dan Jaminan Sosial pada Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta ..... 41
BAB III PELAYANAN KESEJAHTERAAN SOSIAL TERHADAP PEKERJA MIGRAN BERMASALAH ..... 45
A. Permasalahan Pekerja Migran Bermasalah Daerah Istimewa Yogyakarta 45

B. Pelayanan Kesejahteraan Sosial Terhadap Pekerja Migran Bermasalah oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta ..... 48
1. Penampungan di RPTC untuk Pemulangan ke daerah asal ..... 48
2. Bantuan UEP dan perujukan ke RPTC ..... 51
a. Tahap persiapan ..... 51
b. Tahap pelaksanaan pemberian bantuan stimulan UEP ..... 65
c. Tahap pengakhiran (Terminasi) ..... 70
BAB IV PENUTUP ..... 74
A. Kesimpulan ..... 74
B. Saran ..... 77
Daftar Pustaka ..... 80
Lampiran ..... 84

# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar belakang masalah

Mendapatkan pekerjaan merupakan idaman setiap manusia. Bahkan dalam mendapatkannya semua jalan ditempuh termasuk bermigrasi ke daerah lain baik di dalam negeri maupun ke luar negeri. Tentunya dengan keberanian bermigrasi akan menghadapi tantangan dan masalah tersendiri, berbeda dengan yang tidak. Sebagai pekerja migran ia akan mengidentifikasi tempat tujuan mereka mulai dari mengenal budaya, bahasa, agama kondisi sosial dan lain-lain. Berdasarkan tipe daerah tujuannya pekerja migran bisa dibedakan sesuai dengan dibagi atas dua macam : pertama, pekerja migran domestik (dalam negeri) adalah orang yang pergi bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Perpindahan ini seringnya terjadi pada penduduk berasal dari desa ke kota (urbanisasi), atau sebutan baginya adalah "orang desa yang kerja di kota."

Kedua adalah pekerja migran internasional yang mana mereka bekerja dengan cara meninggalkan kampung halaman menuju ke negara lain di seluruh dunia. Keberadaan mereka lebih dikenal dengan nama Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Terlebih karena mayoritas dari mereka adalah wanita, istilah lain yang muncul adalah Tenaga Kerja Wanita (TKW). Mereka disebut juga sebagai

"Pahlawan Devisa"karena telah menjadi penyumbang pendapatan devisa negara tiap tahun.[1]

Pekerja migran domestik dan pekerja migran internasional menghadapi berbagai tekanan ketika harus kembali ke kampung halaman, tak jarang diantaranya pulang dengan membawa masalah. Pekerja migran yang mengalami kondisi ini termasuk ke dalam kategori PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial) yang mendatangkan kewajiban bagi negara untuk memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasar Tim Publikasi dan Pemberitaan Biro Humas Kemensos RI membutuhkan revitalisasi regulasi[2] yang diakibatkan oleh semakin tingginya minat warga Indonesia untuk bekerja di luar negeri. Penyalur tenaga kerja memiliki andil terhadap naiknya minat bekerja di luar negeri ini. Sering kali pihak penyalur hanya berperan sebagai perantara tanpa memberi pelatihan untuk menunjang keterampilan calon pekerja. Banyak dari pekerja migran yang tidak terlatih menyimpan berbagi permasalahan dan membutuhkan pelayanan kesejahteraan sosial saat dipulangkan.

Pekerja migran Internasional khususnya menjadi TKI pada dasarnya bukanlah merupakan permasalahan sehingga perlu dihentikan penyalurannya. Tidak sedikit dari para pekerja migran tersebut yang pulang dengan membawa

---

[1] Jppn.com, *Nusron Harapkan Remitansi TKI bisa Tingkatkan Perekonomian Desa*, http://www.jpnn.com/read/2015/08/11/319961/Nusron-Harapkan-Remitansi-TKI-Bisa-Tingkatkan-Perekonomian-Desa- diakses tanggal 20 Oktober 2015 pukul 10:53 WIB.

[2] Tim Publikasi dan Pemberitaan Biro Humas, *Butuh regulasi Antisipasi Animo Warga Jadi Pekerja Migran*, http://www.kemsos.go.id/modules.php?name= News&file=article &sid=18438, diakses pada 20 Oktober 2015 pukul 10:53 WIB.

keberhasilan mampu memperbaiki perekonomian keluarganya.[3] Di samping itu, program migrasi menjadi upaya pemerintah dalam mengurangi angka pengangguran yang ada di Indonesia. Keberhasilan dari program migran ini sendiri dibuktikan dengan adanya sumbangan yang tinggi terhadap devisa negara ini. Bank Indonesia (BI) mencatat uang kiriman dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri (remitansi) pada tahun 2014 sebesar USD 8.345.070.344 atau setara Rp 105.982.393.368.800 dengan asumsi nilai tukar Rp 12.700 per 1 USD. Data BI mengenai remitansi ini diterima Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) pada minggu pertama Februari 2015.[4] Maka dari itu yang diperlukan saat ini adalah bagaimana memberikan pelayanan yang terbaik terhadap mereka yang mengalami masalah saat kembali ke kampung halaman mereka.

Peran pelayanan kepada pekerja migran bermasalah ini sejatinya merupakan tanggung jawab negara yang mana pelaksanaannya dilakukan oleh beberapa instansi yang diatur dalam peraturan presiden nomor 45 tahun 2013 tentang koordinasi pemulangan tenaga kerja Indonesia.[5] Koordinasinya terdiri dari susunan organisasi yaitu pengarah dan pelaksana.

---

[3] Humas BP3TKI Semarang, *Lagi, Cetak TKI Sukses Lewat Pemberdayaan di Kebumen*, http://www.bnp2tki.go.id/read/10657/Lagi-Cetak-TKI-Sukses-Lewat-Pemberdayaan-di-Kebumen, data diakses pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 20.09 WIB.

[4] BNP2TKI, *BI Mencatat Remitansi TKI Tahun 2014 Sebesar Rp. 105,9 Trilyun*, http://www.bnp2tki.go.id/read/9887/BI-Mencatat-Remitansi-TKI-Tahun-2014-Sebesar-Rp-1059-Trilyun.html, data diakses pada tanggal Kamis 16 Juni 2016 pukul 14.50 WIB.

[5] Peraturan Presiden RI nomor 45 tahun 2013 tentang koordinasi pemulangan tenaga kerja Indonesia. Bagian kedua pasal 8.

Koordinasinya terdiri dari susunan organisasi yaitu pengarah dan pelaksana. Tim pengarah yaitu : Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, Menteri Luar Negeri, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Perhubungan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Sekretaris Kabinet, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia. sedangkan tim pelaksana dalam koordinasi ini adalah para direktur/ seksi/ asisten yang berada di bawah kementrian tersebut.

Bentuk susunan organisasi yang melibatkan kementrian sosial sebagai tim pengarah dan direktur jenderal perlindungan dan jaminan sosial sebagai tim pelaksana. Setelah dilakukan pemulangan pekerja migran bermasalah dengan koordinasi berbagai kementrian, selanjutnya menjadi tugas dinas sosial provinsi untuk melakukan pelayanan pemberdayaan kepada pekerja migran bermasalah untuk mengembalikan keberfungsian sosialnya.

Data tentang penempatan dan kepulangan tenaga kerja Indonesia periode 1 Januari s/d 31 Oktober 2014 yang dipublikasikan oleh Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) menyebutkan hampir setiap daerah terdapat TKI yang bermasalah, termasuk Yogyakarta. Yogyakarta sendiri merupakan salah satu dari 14 debarkasi di seluruh Indonesia. Tercatat menempati urutan ke 8 dari seluruh pemulangan TKI dan memiliki data TKI bermasalah

sebanyak 119 pekerja migran.[6] Siantar permasalahannya dapat dilihat dalam tabel berikut :

| NO | JENIS MASALAH | 2011 (JUMLAH) | 2012 (JUMLAH) | 2013 (JUMLAH) | 2014 (JUMLAH) | 2015 (s.d Feb) (JUMLAH) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Komunikasi Tidak Lancar | 113 | 85 | 1 | 0 | 0 |
| 2 | Tidak Mampu Bekerja | 45 | 35 | 24 | 8 | 4 |
| 3 | Majikan Bermasalah | 22 | 22 | 7 | 3 | 3 |
| 4 | Sakit Akibat Kerja | 34 | 19 | 23 | 1 | 1 |
| 5 | Dokumen Tidak Lengkap | 173 | 8 | 12 | 16 | 0 |
| 6 | Majikan Meninggal | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Sakit Bawaan | 29 | 4 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Membawa Anak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | PHK Sepihak | 31 | 3 | 78 | 0 | 0 |
| 10 | Penganiayaan | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Gaji Tidak Dibayar | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | TKI Hamil | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | Kecelakaan Kerja | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | Pekerjaan Tidak Sesuai PK | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Pelecehan Seksual | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Masalah Lainnya | 439 | 354 | 277 | 119 | 37 |
| | Total | 910 | 542 | 426 | 151 | 47 |

[6] Data tentang penempatan dan kepulangan tenaga kerja Indonesia periode 1 januari s.d 31 Oktober 2014.

Dari jumlah tersebut di Yogyakarta mengalami penurunan dari pada jumlah pada tahun sebelumnya. Adanya penurunan tersebut tidak lepas dari peran dinas sosial yang memberikan pelayanan terhadap pekerja migran bermasalah. Sehingga menjadi menarik untuk diteliti bagaimana pelayanan terhadap pekerja migran di Daerah Istimewa Yogyakarta oleh Dinas Sosial ini.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut penulis memilih untuk memberikan judul pada penelitian ini "**Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Pekerja Migran Bermasalah Oleh Dinas Sosial Daerah Istimewa Yogyakarta**."

## B. Rumusan Masalah

Sebagaimana dijelaskan dalam latar belakang terkait pekerja migran bermasalah diatas maka kemudian penulis membatasi rumusan masalah yang diteliti sebagai berikut :

1. Bagaimana permasalahan yang dihadapi pekerja migran DIY?
2. Bagaimana Dinas Sosial DIY melaksanakan pelayanan sosial peningkatan kesejahteraan sosial bagi pekerja migran bermasalah?

## C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang timbul dari adanya latar belakang diatas adalah :

1. Menjelaskan apa saja masalah yang dihadapi pekerja migran di DIY.
2. Menjelaskan upaya Dinas Sosial DIY dalam meningkatkan kesejahteraan sosial terhadap pekerja migran bermasalah.

## D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang akan didapat dari adanya penelitian tentang pelayanan kesejahteraan sosial bagi pekerja migran bermasalah adalah :

1. Manfaat teoritis

   Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan dalam menambah pengetahuan serta wawasan ilmiah bagi program studi ilmu kesejahteraan sosial, dinas sosial seksi korban tindak kekerasan, pekerja migran dan jaminan sosial serta bagi pekerja sosial dalam melakukan pelayanan dan penanganan pekerja migran bermasalah.

2. Manfaat Praktis

   Penelitian ini akan bermanfaat terhadap praktek pelayanan kesejahteraan sosial yang lebih baik sehingga problem masyarakat terkait pelayanan kesejahteraan bagi pekerja migran bermasalah tidak lagi ditemui. Sedangkan bagi pekerja sosial akan menyesuaikan praktek yang dilakukannya dalam rangka memperbaiki pelayanan kesejahteraan terhadap pekerja migran bermasalah.

## E. Kajian pustaka

Sebagaimana telah dikemukakan pada subbab sebelumnya, maka untuk mendukung penelitian yang lebih komprehensif, peneliti berusaha melakukan telaah awal terhadap karya-karya yang dianggap memiliki relevansi terhadap topik-topik yang diteliti. Berikut adalah karya-karya yang dapat dijadikan rujukan ataupun perbandingan dengan penelitian ini.

Penelitian pertama adalah Jurnal publikasi dari lembaga LP3KIS dengan Judul "pendampingan sosial bagi calon pekerja migran dan keluarganya di daerah asal studi masalah dan kebutuhan." Penelitian tersebut dilakukan di beberapa wilayah di Indonesia yakni di Cilacap, Indramayu, dan Tulungagung dalam hal pendampingan yang sesuai diberikan kepada calon TKI dan mantan TKI. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, dengan maksud memaparkan secara obyektif kondisi masalah dan kebutuhan pendampingan sosial bagi calon TKI di daerah asal. Respondennya adalah calon TKI dan keluarganya; mantan TKI dan keluarganya; dan tokoh masyarakat setempat. Guna melengkapi data yang dibutuhkan penelitian ini, maka ditetapkan pula sebagai informan para petugas instansi terkait. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, studi dokumentasi, diskusi kelompok, dan observasi.

Hasil kajian dalam penelitiannya adalah memberikan rekomendasi perlunya pendampingan sosial bagi calon TKI di daerah asal. Ada tiga pilihan model yang diajukan, yakni dalam bentuk: 1) Pola terpadu; 2) Tim kerja; dan 3) Tim bersifat lokal. Konsep dasar yang dianggap tepat untuk pendampingan sosial adalah manajemen kasus. Pada mana tim pekerja sosial melakukan berbagai peran, dengan mengaplikasikan berbagai teknik, untuk membantu calon TKI dan keluarganya secara holistik sesuai kebutuhan spesifiknya. Pendekatan manajemen kasus, menunjuk pada upaya tim pekerja sosial membantu calon TKI dan keluarganya, dengan cara mengorganisasikan dan mengkoordinasikan serta memelihara jaringan pelayanan dari aneka sumber. Strategi pelayanan demikian, dipandang sesuai untuk membantu TKI, karena seorang TKI memerlukan pelayanan dari banyak sumber.

Melalui kegiatan pendampingan sosial ini diharapkan akan meminimalisir permasalahan yang mungkin menimpa TKI, mulai dari rekruitmen, penempatan, sampai dengan purna penempatan (kembali ke daerah asal).[7]

Kedua penelitian oleh Nur Solikin AR dalam bukunya yang berjudul Otoritas Negara dan Pahlawan Devisa. Buku tersebut menguraikan terkait bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler Indonesia terhadap TKI di Malaysia, sehingga dapat membatu menyelesaikan kasus-kasus yang menimpa TKI di sana. Dijelaskan di dalamnya adalah permasalahan-permasalahan yang umum di jumpai pekerja migran seperti adanya imigran gelap, pencari suaka dan pengungsi, bentuk migrasi pekerja di Malaysia, kebutuhan politik di belakang migrasi, trafficking, seksualitas dalam migrasi, dan gender di dalamnya.

Nur Solikin mengidentifikasi dasar hukum yang melindungi TKI di luar negeri yaitu : konvensi Wina tahun 1961 tentang hubungan diplomatik serta konvensi Wina tahun 1963 tentang hubungan konsuler, deklarasi universal PBB tentang hak asasi manusia tahun 1948, *International Covenat on Civil and Politic Rights (ICCPR), International Covenat on Economic, Social and Culture Rights (ICESCR)*, Deklarasi PBB tentang perlindungan dari penyiksaan tahun 1975, *The 1990 International Convention on The Protection of The Right of all Migran and*

[7] Sutaat, dkk., *Pendampingan Sosial Bagi Calon Pekerja Migran Dan Keluarganya Di Daerah Asal Studi Masalah Dan Kebutuhan*, (Jakarta: LP3KIS, 2011).

*members and The Familiars,* dan Undang-undang on 39 tahun 2004 tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri.

Hasil penelitian dalam buku Nur Solikin adalah bentuk-bentuk perlindungan yang harus diberikan perwakilan diplomatik dan konsuler kepada TKI di Malaysia berupa perlindungan yang menggunakan pijakan atas keputusan ILO (International Labour Organization), dan bentuk perlindungan yang dijabarkan dalam Undang-undang RI. Keputusan ILO itu berupa : konvensi ILO No. 97 tahun 1949 dan konvensi ILO No. 143 tahun 1975. Sedangkan bentuk perlindungan menurut Undang-undang tertuang dalam UU No. 37 Tahun 1999 dan UU No. 39 tahun 2004.[8]

Ketiga penelitian oleh Dra. Sri Gati Setiti dan Drs. Masngudin, M.Hum yang diterbitkan oleh Pusat Penelitian Dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial Departemen Sosial RI dengan judul Uji Coba Model Pemberdayaan Migran Di Kota-Kota Besar di Indonesia (studi kasus di Surabaya, Palembang, dan Yogyakarta). Penelitian ini berupa penelitian tindakan partisipatif dengan menerapkan model pemberdayaan kepada migran domestik di 3 kota besar di Indonesia yaitu Surabaya, Palembang, dan Yogyakarta. Pelaksanaan uji coba diawali dengan dilakukannya "prakondisi kelompok", yakni penyampaian informasi awal tentang rencana kegiatan dan mendorong kelompok pemberdayaan dalam "proses penyadaran", pemahaman, penerimaan dan keterlibatan masyarakat secara penuh atau partisipasi aktif. Selanjutnya dilakukan pemberdayaan dengan

[8] Nur Solikin AR, *Otoritas Negara & Pahlawan Devisa,* (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013).

membagi pekerja migran ke dalam beberapa kelompok sesuai kriteria dari peneliti yang di isi dengan penggalian, stimulan bergulir, bimbingan dan penyuluhan, pengembangan usaha, dan pendampingan. Bentuk pendampingan yang dilakukannya adalah memotivasi, membimbing, memberikan pelatihan kepada pekerja migran yang selama penelitian mengalami kesulitan.

Hasil yang diperoleh dalam penelitian uji coba ini adalah didapatnya model pemberdayaan tahun 2003. Kondisi migran setelah dilakukan pemberdayaan tersebut adalah mengenal dinamika kelompok, kenal masalah potensi kebutuhan dan rencana kegiatan, memiliki keterampilan dalam UEP, adanya simpan pinjam koperasi berorganisasi, menjadi lebih normatif yaitu terbina bentuk partisipasi pendelegasian wewenang, dan adanya akses ke sumber.[9]

## F. Kajian Teori

1. Pelayanan kesejahteraan sosial

Program pelayanan adalah serangkaian kegiatan yang terorganisir dan bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial serta bertujuan untuk memberikan dukungan antara lain memenuhi kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kualitas hubungan sosial antar manusia, menumbuhkembangkan kemampuan dalam pemecahan masalah dan pelaksanaan peranan sosialnya, memfasilitasi peluang-peluang usaha

[9] Dra. Sri Gati Setiti dan Drs. Masngudin, *Uji Coba Model Pemberdayaan Migran Di Kota-Kota Besar di Indonesia(studi kasus di Surabaya, Palembang, dan Yogyakarta)*, (Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI, 2004).

agar mampu meningkatkan taraf kesejahteraan dan tanggung jawab sosialnya. [10]

Makna dari pelayanan sendiri menurut Sampara yang dikutip oleh Lijan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam interaksi langsung antar seseorang dengan orang lain atau mesin secara fisik, dan menyediakan kepuasan pelanggan.[11] Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia menjelaskan arti dari pelayanan sebagai hal, cara, atau hasil melayani. Kata melayani sendiri adalah menyuguhi (orang) dengan makanan atau minuman; menyediakan keperluan orang; mengiyakan, menerima; atau juga bisa diartikan menggunakan. [12]

Kesejahteraan sosial bila diartikan secara terpisah, kesejahteraan sendiri berarti hal atau keadaan sejahtera; keamanan, keselamatan, ketenteraman. Sedangkan sosial berarti semua hal yang berkenaan dengan masyarakat. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan arti gabungan dari dua kata tersebut yaitu kesejahteraan sosial yang disini diidentikkan dengan pekerjaan sosial dimana menurut Miftahul Hudamerupakan muara dari tujuan praktek intervensi pada berbagai aras di bidang pekerjaan sosial baik pada level mikro, mezzo, maupun

---

[10]Dirjen. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna susila, *Standar Pelayanan Minimal dan Rehabilitasi Sosial Tuna Susila*, (jakarta: Depsos RI, 2005), hlm 4.

[11] Dr. Lijan Poltak Sinambela, M.M., M.Pd. dkk., *Reformasi pelayanan publik : Teori, Kebijakan dan Impelementasi*, (jakarta : PT Bumi Aksara, Cetakan kedua 2007), hlm 5.

[12]J.S. Badudu, Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm 781-782.

makro.[13] Sedangkan dalam ketentuan umum Permensos No 8 Tahun 2012, kesejahteraan sosial diartikan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.[14]

Pelayanan kesejahteraan sosial di Indonesia menurut Edi Suharto lebih dikenal dengan pembangunan kesejahteraan sosial. Di dalamnya mencakup berbagai bentuk intervensi sosial dan pelayanan sosial untuk memenuhi kebutuhan manusia, mencegah dan mengatasi masalah sosial, serta memperkuat institusi-institusi sosial.[15]

Kebijakan menteri sosial yang mengatur tentang pemulangan pekerja migran bermasalah dan tenaga kerja Indonesia bermasalah ke daerah asal ada dalam Peraturan menteri sosial nomor 22 tahun 2013.

Proses dalam pelayanan sosial sendiri menurut Isbandi Rukminto Adi yang mengutip Skidmore, Thackeray, dan Farley dengan mengambil sudut pandang klien bahwa terdapat 4 tahapan yaitu : tahap

---

[13]MiftahulHuda, M.Si., *Ilmu Kesejahteraan sosial : Paradigma dan teori*, (Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru, Cetakan II 2013), hlm 5.

[14]Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, Tentang "*Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial*"hlm 4. Lihat juga Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang *Kesejahteraan Sosial dalam ketentuan umum* pasal 1 ayat 1.

[15] Edi Suharto, Ph, D., *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, (Bandung : Refika Aditama, 2014), hlm.4

'penelitian' *(Study Phase)*, tahap pengkajian *(Assesment Phase)*, tahap intervensi, tahap terminasi.[16]

1. Tahapan penelitian *(Study Phase)* yaitu tahap di mana klien mulai berinteraksi menjalin relasi dengan pendamping. Tahap ini sering diartikan sama dengan tahap *engagement* antara pekerja sosial dan klien. Selama menjalin relasi tersebut klien akan memutuskan apakah dirinya bersedia untuk mendapatkan pelayanan yang akan diberikan oleh pendamping ataukah tidak. Keputusan itu nantinya akan menentukan kelancaran kinerja pendamping dalam mengumpulkan data riwayat masalah yang dihadapi klien. Pendamping sendiri diharuskan mulai memilah milah data riwayat klien yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah klien. Disinilah maksud dari tahap penelitian yaitu memilah-milah data yang sesuai permasalahan klien. Biarpun begitu tahap ini juga sering tercampur dengan tahapan asesmen dan tahap intervensi dikarenakan tidak jarang pendamping sudah mulai melakukannya pada saat bertemu pertama kali.[17]
2. Tahap pengkajian *(Assesment Phase)* adalah suatu proses kegiatan pengumpulan dan analisis data untuk

[16] Isbandi Rukminto, Adi. *Kesejahteraan Sosial, (Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013), Hlm. 170-173.
[17] *Ibid,* Hlm. 171.

mengungkapkan dan memahami masalah, kebutuhan, dan sistem sumber klien. Hasil dari asesmen tersebut maka akan diperoleh data yang lebih mendalam, jelas dan akurat karena didapat secara menyeluruh dan integral, sehingga dapat dijadikan langkah menyusun rencana intervesi yang tepat guna pemecahan masalah yang dihadapi klien.[18]

3. Tahap intervensi (*Intervention*) yaitu suatu proses pelaksanaan rencana pemecahan masalah yang telah dirumuskan. Bentuk dari intervensi ini bisa menyesuaikan hasil dari asesmen yang telah dilakukan. Dalam kasus pekerja migran sendiri bentuk intervensinya bisa bermacam-macam, menurut Edi Suharto setidaknya Pelayanan sosial mencakup: Jaminan sosial, Perumahan, Kesehatan, Pendidikan, dan Pelayanan sosial personal.[19] Bidang jaminan sosial merupakan sistem atau skema pemberian tunjangan yang menyangkut pemeliharaan penghasilan (*Income Maintenance*). Di dalamnya juga mencakup bantuan sosial (*Social Assistance*), yakni bantuan uang atau barang yang biasanya diberikan kepada kelompok miskin tanpa mempertimbangkan

[18] A. ZeinArifin, *Manajemen Kasus dalam Pekerjaan Sosial*, http://mail.kemsos.go.id/home/nawir@kemsos.go.id/Download%20Article/MANAJEMEN%20KASUS%20DALAM%20PEKERJAAN%20SOSIAL.doc, diakses pada 13 September 2015 pukul 16:53 wib.

[19]Edi Suharto, Ph, D., *Membangun Masyarakat...* Hlm. 15.

kontribusinya. Bidang perumahan, dimana perumahan merupakan kebutuhan dasar manusia yang wajib dicukupi pemerintah dalam hal pelayanan kesejahteraan. Pelayanan ini bisa berbentuk penyediaan rumah, sewa murah, cicilan ringan ataupun pemberian kemudahan kepada penyedia rumah bagi kebutuhan khusus. Selanjutnya, bidang kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial. Orang yang sejahtera bukan saja orang yang memiliki pendapatan atau rumah memadai, Melainkan pula orang yang sehat, baik jasmani maupun rohani. Kemudian bidang pendidikan, pendidikan juga bukan tanggung jawab dinas sosial secara mutlak, melainkan ada dinas pendidikan atau kementrian pendidikan yang menanganinya. Peran yang harus ada dalam bidang pelayanan kesejahteraan sosial adalah pendidikan alternatif bagi penyandang kebutuhan khusus, penyandang difabilitas, lanjut usia, adat terpencil, anak jalanan, serta pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial lainnya. Terakhir adalah pelayanan sosial personal, dimana pelayanan ini merupakan pelayanan diluar jaminan sosial, pelayanan rumah, kesehatan, dan pendidikan.

4. Tahap Terminasi. Terminasi adalah suatu proses pemutusan hubungan pelayanan atau pendampingan antara pekerja sosial atau lembaganya dengan penerima layanan (klien). Terminasi ini setidaknya disertai kesamaan pandangan antara klien dan pendamping terkait tujuan dari diadakannya pendampingan. selain itu terminasi juga dapat dilakukan apabila pendamping merasa klien sudah dapat mengatasi masalahnya. Atau, terminasi yang dilakukan atas dasar tidak terjalinnya relasi yang baik antara pendamping dan klien. Dalam bentuk lain, terminasi juga dapat dilakukan dengan dilakukannya rujukan yaitu suatu kegiatan merancang, melaksanakan, mensupervisi, mengevaluasi, dan menyusun laporan kegiatan rujukan penerima program pelayanan kesejahteraan sosial.

2. Pekerja Migran Bermasalah

Definisi pekerja migran adalah orang yang bermigrasi dari wilayah kelahirannya ke tempat lain dan kemudian bekerja di tempat yang baru tersebut dalam jangka waktu relatif menetap. Pekerja migran sendiri berdasar peraturan menteri sosial[20] diartikan sebagai warga negara Indonesia yang berpindah ke daerah lain baik di dalam maupun ke luar

[20] Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2013 Tentang Pemulangan Pekerja Migran Bermasalah Dan Tenaga Kerja Indonesia Bermasalah Ke Daerah Asal, Bab I pasal 1 ayat 2.

negeri secara legal maupun ilegal untuk bekerja yang mempunyai ukuran jangka waktu tertentu.

Pekerja migran mencakup sedikitnya dua tipe: pekerja migran domestik dan pekerja migran internasional.[21]

Pekerja migran domestik berkaitan dengan urbanisasi, sedangkan pekerja migran internasional tidak dapat dipisahkan dari globalisasi. Pekerja migran domestik (dalam negeri) adalah orang yang bermigrasi dari tempat asalnya untuk bekerja di tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah Indonesia. Karena perpindahan penduduk umumnya dari desa ke kota (*rural-to-urban migration*), maka pekerja migran domestik sering kali diidentikkan dengan "orang desa yang bekerja di kota."

Pekerja migran internasional (luar negeri) adalah mereka yang meninggalkan tanah airnya untuk mengisi pekerjaan di negara lain. Di Indonesia, pengertian ini menunjuk pada orang Indonesia yang bekerja di luar negeri atau yang dikenal dengan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI). Karena persoalan TKI ini sering kali menyentuh para buruh wanita yang menjadi pekerja kasar di luar negeri, TKI biasanya diidentikkan dengan Tenaga Kerja Wanita (TKW atau Nakerwan).[22]

Sedangkan Pekerja Migran Bermasalah adalah seseorang yang bekerja di dalam maupun di luar negeri yang mengalami masalah, baik dalam bentuk tindak kekerasan, eksploitasi, pengusiran, keterlantaran,

---

[21] Edi Suharto, Ph, D., *Membangun Masyarakat...* Hlm. 177.
[22] *Ibid.* Hlm. 178.

disharmoni sosial, ketidakmampuan menyesuaikan diri sehingga mengakibatkan fungsi sosialnya terganggu.[23]

Menurut Sulistiyowati masalah-masalah yang dihadapi pekerja migran dibedakan menjadi beberapa tahapan yakni pada proses rekrutmen, pra-pemberangkatan, penempatan, dan saat pulang ke kampung halaman.[24]

Pada proses rekrutmen terdapat penipuan informasi yang menyesatkan mengenai jenis dan kondisi pekerjaan, adanya penjeratan hutang, pemalsuan dokumen dan tidak ada kontrak yang ditandatangani pekerja migran.

Kemudian pada tahap pra-pemberangkatan, pekerja migran dihadapkan pada permasalahan seperti lilitan hutang untuk kebutuhan pokok (seperti makanan, akomodasi, kesehatan, dan berbagai pengeluaran tak terduga lainnya), pemalsuan dokumen resmi dan penahanan yang tidak sah. Selain itu, pekerja migran juga bisa saja mendapatkan fasilitas akomodasi yang umumnya di bawah standar, rawan terhadap pelecehan seksual, kekerasan fisik, dan transportasi yang berbahaya.

Pada tahap penempatan di negara tujuan yaitu adanya pelanggaran hak-hak pekerja, situasi kerja yang tidak aman, kekerasan fisik, psikologis dan seksual, dikurung, terjepit hutang (jeratan hutang), tidak

---

[23] *Ibid,*. Pasal 1 ayat 3.

[24] Sulistiyowati Irianto, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Migran Domestik di Uni Emirat Arab,* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011), Hlm, 12.

dibayar, pemotongan gaji, dipenjara, identitas dan dokumen perjalanan ditahan.

Terakhir adalah permasalahan yang dialami pekerja migran di ketika pulang ke kampung halaman. Permasalahan-permasalahan mereka termasuk pemerasan, biaya yang terlalu mahal untuk jasa bandara dan petugas cukai, penukaran valuta asing, agen transportasi, dan dalam sejumlah kasus mereka harus membayar hutang setibanya di kampung halaman.

Secara tarpisah, Sulistyowati juga merinci permasalahan yang dialami pekerja migran dengan mengambil data permasalahan yang dirilis oleh BNP2TKI yaitu pekerjaan tidak sesuai kontrak, tidak mampu bekerja, gaji tidak dibayar, dokumen tidak lengkap, penganiayaan, pelecehan seksual, majikan bermasalah, komunikasi tidak lancar, kecelakaan kerja, sakit akibat kerja, sakit bawaan, majikan meninggal, TKI hamil, membawa anak, dan PHK sepihak.[25]

## G. Metodologi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sesuai dengan apa yang telah dijelaskan pada rumusan masalah di atas bahwa penelitian ini membahas mengenai bagaimana pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial kepada pekerja migran bermasalah tersebut dan bagaimana peran pekerja sosial dalam

[25] *Ibid,*. Hlm, 18.

melakukan pelayanan kesejahteraan kepada pekerja migran tersebut, dengan demikian penelitian ini termasuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Atherton dan Klemmack penelitian deskriptif bertujuan memberi gambaran tentang suatu masyarakat atau kelompok orang atau gambaran suatu gejala atau hubungan antara dua gejala atau lebih.[26]

2. Subjek dan Objek Penelitian

   a. Subjek penelitian

      Subjek dari penelitian merupakan sumber utama dalam memperoleh data dan keterangan guna menyusun penelitian.[27] Informan adalah mereka yang memenuhi kriteria untuk memberikan data dan keterangan untuk kemudian dijadikan sumber informasi. Dalam memperoleh informan peneliti menggunakan cara *Purposive sample*. Alasannya adalah karena peneliti mengambil informan berdasar atas data yang dimiliki dinas sosial D.I.Yogyakarta serta didasarkan atas kriteria tertentu.[28] Kriteria yang diberikan adalah mereka yang menjadi pekerja migran bermasalah, data dari dinas sosial dan laporan dari pekerja sosial tahun 2014 terhadap 10 orang yang telah mendapat pelayanan mereka. Adapun mereka yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah kepala seksi korban

---

[26]Arthenton dan Klemmack dalam Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), hlm 25.

[27] Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1989), hlm 92.

[28] Irawan Soerhartono, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya,* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), hlm. 62.

tindak kekerasan, pekerja migran dan jaminan sosial dinas Sosial, Pekerja Migran Bermasalah penerima pelayanan kesejahteraan berjumlah 3 informan, dan 1 pekerja sosial tahun 2014.

b. Objek Penelitian

Objek dalam penelitian ini adalah pelayanan yang dilakukan dinas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta kepada pekerja migran bermasalah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam model penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan beberapa teknik untuk memperoleh data yang benar-benar relevan sehingga dibutuhkan metode yang tepat untuk mengungkapkannya.[29]

a. Observasi

Observasi merupakan serangkaian kegiatan dalam melakukan pengukuran yang dalam sebuah penelitian dibatasi oleh penggunaan indera penglihatan yang berarti tidak melakukan pertanyaan-pertanyaan.[30] Berdasarkan keterlibatan pengamat dibagi menjadi dua yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan model observasi non-partisipan dengan mencari data subjek ketika menerima pelayanan dari dinas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal itu dimaksudkan

[29]Suharsini, Arikunto. *Managemen penelitian*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004), hlm. 13-14.
[30] Irawan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, hlm. 69.

karena data pelayanan dirasa lebih lengkap proses pelayanannya kepada subyek yang sudah selesai mendapat pelayanan.

Berdasarkan cara pengamatan yang dilakukan, penelitian ini termasuk ke dalam observasi tak berstruktur. Pengamat tidak membawa catatan tertentu tentang tingkah laku apa saja yang secara khusus akan diamati. Selama proses observasi pengamat akan mencatat atau meringkas tingkah laku untuk kemudian dianalisis.

b. Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpul data) kepada responden, dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.[31] Dalam penelitian ini wawancara dilakukan bersifat terbuka dan tatap muka secara langsung. Hal tersebut memungkinkan informan untuk mengetahui maksud dan tujuan pewawancara. Sebelum proses wawancara dimulai, pewawancara mempersiapkan *Interview guide* untuk mengetahui maksud dan tujuan wawancara yang akan dilakukan dan tidak keluar dari jalur yang telah ditentukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data tertulis atau film yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari penyidik. Data tersebut bisa berupa tulisan, buku-buku majalah,

[31]*Ibid*. hlm. 67-68.

dokumentasi foto, peraturan-peraturan notulen rapat, catatan harian dan lain-lain.[32]

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menghimpun atau pengumpulan dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi, dan bahan-bahan lain sehingga dapat dengan mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada yang lain. Analisis data dapat dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut:[33]

a. Reduksi data yaitu proses menyeleksi atau memilih semua data atau informasi dari lapangan yang telah diperoleh dari hasil proses wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait pelayanan kesejahteraan kepada pekerja migran. Reduksi data digunakan untuk menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi sehingga pokok bahasan bisa ditarik.
b. Penyajian data yaitu menyusun data atau informasi yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dengan sistematik sesuai dengan pembahasan yang telah direncanakan. Tahapan ini dimaksudkan untuk mempermudah dalam membaca dan menarik kesimpulan.

---

[32]Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 330.

[33]Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), hlm. 209.

c. Menarik kesimpulan atau verifikasi data yaitu melakukan penarikan kesimpulan atas data yang telah disusun untuk menjawab rumusan maslah sebagai hasil kesimpulan.

5. Keabsahan Data

Keabsahan data yaitu pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.[34]Hal ini akan dicapai dengan triangulasi, yaitu membandingkan data hasil wawancara dengan hasil observasi untuk memastikan tidak ada informasi yang bertentangan. Apabila ternyata antara dua metode ada yang tidak relevan, peneliti akan menginformasi perbedaan itu kepada informan. Hasil konfirmasi diuji lagi dengan informasi-informasi sebelumnya dari informan atau sumber-sumber lain.

## H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dalam penelitian ini disusun ke dalam empat bab yaitu:

Bab pertama, merupakan pendahuluan, bab ini berfungsi sebagai pengantar dan pengarah kajian bab-bab selanjutnya yang memuat di antaranya penegasan judul, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

[34]Lexy J. Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, hlm. 178.

Bab kedua, merupakan gambaran umum tentang dinas sosial dan permasalahan umum pekerja migran bermasalah.

Bab ketiga, dibahas terkait hasil penelitian yang telah dilakukan yang meliputi masalah yang dihadapi pekerja migran DIY, pelayanan apa saja yang diberikan oleh dinas sosial DIY terhadap pekerja migran, dan bagaimana praktek pekerja sosial dalam menangani pekerja migran.

Bab keempat adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan melalui bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan memberikan saran-saran yang membangun.

Bagian akhir dari skripsi ini adalah susunan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Berdasarkan pengamatan dan penelitian mengenai pelaksanaan pelayanan kesejahteraan sosial pekerja migran yang dilakukan oleh dinas sosial Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang di dapat adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan pada dinas sosial terdiri dari tiga bentuk yaitu
   a. Pemulangan ke daerah asal

      Mencakup pemulangan pekerja migran bermasalah baik domestik maupun mana negara dengan sistem kerja sama antar berbagai instansi terkait diantaranya dinas tenaga kerja dan transmigrasi, BNP2TKI, RPTC dan lain-lain.
   b. Perujukan dan penampungan ke RPTC

      Bagi pekerja migran bermasalah yang memerlukan adanya rehabilitasi pihak dinas sosial menyediakan shelter RPTC yang berlokasi di berbagai UPT milik dinas sosial.
   c. Pemberian dana stimulan UEP

      Bentuk pemberdayaan yang dilakukan dinas sosial kepada pekerja migran bermasalah ini adalah diberikannya Usaha Ekonomi Produktif (UEP). Namun itu bukanlah satu-satunya yang diberikan dalam upaya pelayanan yang dilakukan oleh dinas sosial. Intervensi lain yang sifatnya sebagai intervensi

pendukung dari penyerahan UEP ini adalah konseling, pelatihan, dan pembinaan.

2. Pelayanan Dinas sosial diberikan kepada pekerja migran bermasalah melalui beberapa tahap yaitu:

   a. Tahap persiapan

      Tahapan kontak ini dilakukan oleh pendamping dengan mengacu data pekerja migran bermasalah dinas sosial dan juga berdasarkan laporan pangkat desa. Setelah diketahui keberadaan pekerja migran, pendamping kemudian mendatangi pekerja migran untuk selanjutnya dilakukan kontrak pelayanan.

   b. Tahap Kontrak

      Kontrak yang dilakukan pendamping pekerja migran bermasalah berisi ketentuan-ketentuan, hak dan kewajiban, serta berbagai kesepakatan kerahasiaan.

   c. Asesmen

      Pada tahap asesmen, pendamping menggunakan instrumen pendataan yang diberikan dinas sosial yang juga disertai catatan-catatan pendamping.

   d. Tahap seleksi hasil asesmen

      Tahap seleksi hasil asesmen ini dilakukan tidak hanya pendamping pekerja migran, tetapi juga dibantu oleh staf-staf dinas sosial guna mengurangi kesalahan sasaran.

   e. Tahap pelaksanaan intervensi

Intervensi selama pelayanan terhadap pekerja migran bermasalah ini berupa pemulangan ke daerah asal, rehabilitasi psikososial, dan bantuan UEP (Usaha Ekonomi Produktif).

f. Monitoring dan evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan berulang kali dengan bertatap muka dengan klien.

g. Tahap terminasi

Terminasi yang dilakukan oleh dinas sosial ini didasarkan atas pelayanan selama satu tahun pendampingan. Hal ini berkaitan dengan kontrak pencairan UEP (Usaha Ekonomi Produktif) yang diberikan dalam waktu satu tahun pendampingan.

3. Pemberian pelayanan kepada pekerja migran bermasalah didasarkan atas laporan dari warga dan juga berdasarkan atas pendataan pendamping dinas sosial.

Dinas sosial memiliki data tersendiri terkait siapa saja pekerja migran bermasalah yang ada di seluruh Yogyakarta. Hanya saja terkadang data yang ada pada dinas tersebut masih perlu di cek lagi di lapangan oleh pendamping. Hal tersebut memang dimaklumi karena keadaan seseorang dapat berubah sewaktu-waktu dengan cepat tanpa diduga sebelumnya.

Mengingat hal tersebut pendamping masih perlu sekali untuk terjun ke lapangan, selain mengkroscek data yang didapat dari dinas sosial ia juga perlu melakukan penjangkauan kepada para

pekerja migran bermasalah lain yang kemungkinan terlewatkan dari data yang diperoleh dinas sosial karena baru muncul atau karena lain sebab.

Bentuk pelayanan dari dinas sosial ini lebih dikategorikan kepada penjangkauan oleh pekerja sosial di mana kesadaran klien untuk datang memperoleh pelayanan masih dirasa kurang. Banyak faktor yang melatarbelakanginya seperti ketidaktahuan akan program pemerintah yang di alokasikan kepada mereka ataupun sekedar kepercayaan diri klien untuk mampu menghadapi permasalahan sendiri.

## B. Saran

Berdasarkan uraian tersebut dirasa saran yang dapat diberikan guna meningkatkan pelayanan dinas sosial kepada pekerja migran bermasalah antara lain:

1. Bagi dinas sosial
   a. Masa pelayanan atau pendampingan yang diberikan kepada klien hendaknya bisa diperpanjang sesuai dengan ukuran keberfungsian klien, tidak hanya terbatas ketika kontrak dinas sosial dengan pendamping usai. Apabila kontrak dengan pendamping menjadi kendala, maka pendampingan yang dirasa masih perlu dilakukan kepada beberapa klien

tersebut bisa dilimpahkan kepada pendamping dengan masa kontrak yang baru.

b. Menambah intensitas sosialisasi adanya program UEP kepada masyarakat untuk untuk mempercepat pelaporan ketika terjadi masalah. Sosialisasi ini bisa ditempuh lewat media elektronik, cetak dan juga melalui forum masyarakat. Memang sosialisasi ini sudah dilakukan oleh dinas sosial sebagai program untuk mengatasi masalah PMKS akan tetapi masih banyak ditemui masyarakat yang tidak tahu akan keberadaannya.

c. Lebih mempersering penjangkauan kepada pekerja migran bermasalah guna mempercepat penanganan keberfungsian klien. Hal ini dimaksudkan karena masih kurangnya kesadaran klien untuk memperoleh bantuan sehingga dinas sosial berkewajiban menjangkaunya sesering mungkin supaya tidak ditemukan massalah yang terlambat penanganan.

2. Bagi pendamping pekerja migran bermasalah yaitu Perlu melakukan pembentukan grup pendampingan pekerja migran bermasalah guna mempermudah dalam melakukan dukungan. Membentuk grup pendampingan ini diharapkan klien lebih bisa mandiri lagi.

3. Bagi penelitian selanjutnya adalah untuk melakukan penelitian pelayanan pekerja migran dengan cakupan mulai dari kepulangan pekerja migran tiba di tanah air hingga penempatan di kampung halaman. Bentuk pelayanan yang didapatkan oleh pekerja migran ini tidak hanya dari dinas sosial saja tetapi pelayanan dilakukan dengan koordinasi beberapa kementrian.

## Daftar Pustaka


Adi, Isbandi Rukminto, *Kesejahteraan Sosial, (Pembangunan Sosial, dan Kajian Pembangunan)*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.

AR, Nur Solikin, *Otoritas Negara & Pahlawan Devisa,* Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013.

Arifin, A. Zein, *Manajemen Kasus dalam Pekerjaan Sosial*, http://mail.kemsos.go.id/home/nawir@kemsos.go.id/Download%20Article/MANAJEMEN%20KASUS%20DALAM%20PEKERJAAN%20SOSIAL.doc, diakses pada 13 September 2015 pukul 16:53 wib.

Arifin,Tatang M, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: Rajawali, 1989.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

BNP2TKI, *BI Mencatat Remitansi TKI Tahun 2014 Sebesar Rp. 105,9 Trilyun*, http://www.bnp2tki.go.id/read/9887/BI-Mencatat-Remitansi-TKI-Tahun-2014-Sebesar-Rp-1059-Trilyun.html, data diakses pada tanggal Kamis 16 Juni 2016 pukul 14.50 WIB.

Data tentang penempatan dan kepulangan tenaga kerja Indonesia periode 1 januari s.d 31 Oktober 2014

Dinas sosial DIY, *Tugas dan Fungsi*, diakses melalui http://dinsos.jogjaprov.go.id/tugas-dan-fungsi/ pada 12:44 tanggal 10 November 2015.

Dinas sosial DIY, *Visi dan Misi,* diakses melalui http://dinsos.jogjaprov.go.id/visi-misi/ pada 12:44 tanggal 10 November 2015.

Dirjen. Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Tuna susila, *Standar pelayanan minimal dan rehabilitasi sosial tuna susila*, Jakarta: Depsos RI, 2005.

Handayani, Kartini Sri. *Seksi Bantu Sosial Korban Tindak Kekerasan Dan Pekerja Migran*, diakses dari

http://dinsos.jatengprov.go.id/index.php/2013-09-30-09-33-48/seksi-bantuan-sosial-korban-tindak-kekerasan-pekerja-migran pada 14/12/2015 pukul 11.13 WIB.

Huda, Miftahul, *Ilmu Kesejahteraan sosial : Paradigma dan teori*, Yogyakarta : Penerbit Samudra Biru, Cetakan II 2013.

Humas BP3TKI Semarang, *Lagi, Cetak TKI Sukses Lewat Pemberdayaan di Kebumen*, http://www.bnp2tki.go.id/read/10657/Lagi-Cetak-TKI-Sukses-Lewat-Pemberdayaan-di-Kebumen, data diakses pada tanggal 22 Maret 2016 pukul 20.09 WIB.

Irianto, Sulistiyowati, *Akses Keadilan dan Migrasi Global: Kisah Perempuan Indonesia Pekerja Migran Domestik di Uni Emirat Arab,* Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

Jppn.com, *Nusron Harapkan Remitansi TKI bisa Tingkatkan Perekonomian Desa*, http://www.jpnn.com/read/2015/08/11/319961/Nusron-Harapkan-Remitansi-TKI-Bisa-Tingkatkan-Perekonomian-Desa- diakses tanggal 20 Oktober 2015 pukul 10:53 WIB.

Kementerian Sosial RI, Pedoman Pendamping Bantuan Usaha Ekonomi Produktif (UEP) Korban Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran. (Jakarta : Direktorat perlindungan sosial korban tindak kekerasan dan pekerja migran, 2012).

Moeleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

Peraturan gubernur daerah istimewa Yogyakarta, nomor 46 tahun 2008. Tentang Rincian Tugas Dan Fungsi Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Sosial.

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2012, Tentang "*Pedoman Pendataan Dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Dan Potensi Dan Sumber Kesejahteraan Sosial*"

Peraturan Presiden RI nomor 45 tahun 2013 tentang koordinasi pemulangan tenaga kerja Indonesia. Bagian kedua pasal 8.

PSKW, Profil PSKW Yogyakarta, http://pskw.jogjaprov.go.id/profil-pskw-yogyakarta/ diakses pada 17 Maret 16, pukul 12.02 WIB.

Setiti, Sri Gati dan Masngudin, *Uji Coba Model Pemberdayaan Migran Di Kota-Kota Besar di Indonesia(studi kasus di Surabaya, Palembang, dan Yogyakarta)*, Jakarta: Pusat Penelitian Dan Pengembangan Usaha Kesejahteraan Sosial, Badan Pelatihan Dan Pengembangan Sosial, Departemen Sosial RI, 2004.

Sinambela, Lijan Poltak, dkk., *Reformasi pelayanan publik : teori, Kebijakan dan Impelementasi*, (jakarta : PT Bumi Aksara, Cetakan kedua 2007)

Soehartono, Irawan, *Metode Penelitian Sosial Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya,* Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011.

Soekanto, Soejono, Kamus Sosiologi edisi 2 Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. III 1993.

Suharsini, Arikunto. *Managemen penelitian*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2004.

Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat Memberdayakan rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan sosial dan pekerjaan sosial*, Bandung : Refika Aditama, 2014.

Sutaat, dkk., *Pendampingan Sosial Bagi Calon Pekerja Migran Dan Keluarganya Di Daerah Asal Studi Masalah Dan Kebutuhan*, Jakarta: LP3KIS, 2011.

Tim Publikasi dan Pemberitaan Biro Humas, *Butuh regulasi Antisipasi Animo Warga Jadi Pekerja Migran*, http://www.kemsos.go.id/modules.php?name= News&file=article &sid=18438, diakses pada 20 Oktober 2015 pukul 10:53 WIB.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang *Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 Tentang *Kesejahteraan Sosial dalam ketentuan umum*.

Zain, J.S. Badudu Sutan Mohammad, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.

# Lampiran

Kepada kasi KTK-PM

1. Bagaimana sejarah terbentunknya seksi KTK-PM Dinsos DIY?
2. Apa tugas pokok dan fungsi seksi KTK-PM Dinsos DIY?
3. Bagaimana pendapat bapak terkait struktur organisasi/ kepengurusan seksi KTK-PM dan staf-staf di seksi KTK-PM Dinsos DIY?
4. Bagaimana sumber dana seksi KTK-PM?
5. Bagaimana bentuk jejaring atau instansi yang bekerja sama dengan seksi KTK-PM?
6. Terkait pekerja migran bermasalah, berapa banyak klien yang sedang mendapat pelayanan kesejahteraan saat ini?
7. Secara keseluruhan, bagaimana bentuk permasalahan yang dihadapi pekerja migran bermasalah pada umumnya?
8. Bagaimana bentuk pelayanan kesejahteraan yang dilakukan seksi KTK-PM kepada pekerja migran bermasalah?
9. Bagaimana proses alur pelayanan kesejahteraan kepada Pekerja migran bermasalah?

Kepada Pekerja Migran Bermasalah

1) Bisakah saya bertanya Nama, TTL dan alamat anda atau melihat KTP anda?
2) Dimana anda pernah menjadi pekerja migran?
3) Apa pekerjaan anda sebelum menjadi pekerja migran?
4) Kapan mulai menjadi pekerja migran dan kapan kepulangannya?
5) Bagaimana proses anda menjadi pekerja migran dimasa lalu?
6) Bagaimana proses kepulangan anda?
7) Apa yang anda alami selama menjadi pekerja migran baik yang positif dan negatif?
8) Tindakan apa yang anda lakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang anda alami saat anda menjadi migran?
9) Bagaimana tanggapan keluarga anda terhadap permasalahan yang anda alami?
10) Bagaimana hubungan anda dengan keluarga ketika menjadi pekerja migran selama menjadi pekerja migran?
11) Apakah masyarakat sekitar anda tahu terkait masalah yang anda alami?
    a. Bila iya mengapa?
    b. Bila tidak mengapa?
    c. Bagaimana reaksi mereka terhadap masalah tersebut?
12) Kemampuan dan keahlian apa yang anda miliki dari sisi 1. Pekerjaan 2. Pengalaman 3. Jejaring?
13) Apa usaha yang sudah anda lakukan untuk memanfaatkan kemampuan dan keahlian anda saat ini?
14) Apa mata pencaharian penduduk di desa anda saat ini?
15) Bagaimana menurut anda mata pencaharian secara umum tersebut untuk dikerjakan atau bagaimana kemungkinan untuk anda kerjakan?
16) Berapa jumlah keluarga anda?

17) Siapa saja yang bekerja di dalam rumah tangga anda?

18) Menurut anda, bagaimana penghasilan dari anggota keluarga yang bekerja?

19) Menurut anda bagaimana keadaan ekonomi anda dibanding dengan warga sekitar anda?

20) Sebelum menjadi pekerja migran, apakah anda pernah memiliki riwayat kesehatan? Bila iya apa bisa diceritakan penyakit tersebut (apa, kapan, apakah masih pengobatan)?

21) Setelah menjadi pekerja migran, apakah anda mengalami permasalahan kesehatan? Bila iya apa bisa diceritakan masalah kesehatan tersebut (apa, bagaimana, apakah masih pengobatan, biaya yang dikeluarkan untuk berobat)?

22) Apakah anda menerima bantuan dari pemerintah selain dari KTK-PM? Bila iya apa saja baik sebelum menjadi pekerja migran maupun setelah menjadi pekerja migran?

Kepada Pendamping/ Pekerja Sosial

1. Apa penyebab seseorang dikatakan sebagai pekerja migran dan dikatakan sebagai pekerja migran bermasalah?
2. Bagaimana bentuk permasalahan yang dialami pekerja migran bermasalah di seksi KTK-PM ini secara keseluruhan/ secara umum?
3. Menurut anda bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pekerja migran bermasalah?
4. Bagaimana tahapan pelayanan kesejahteraan sosial di seksi KTK-PM dinsos DIY?
5. Pihak mana saja yang terlibat dan dilibatkan dalam pelayanan tersebut?
6. Bagaimana proses anda melakukan asesmen terhadap pekerja miggran bermasalah?
7. Bentuk intervensi apa yang pernah diberikan untuk PMB?
8. Bagaimana monitoring dan evaluasi dilakukan?
9. Apa kesulitan/ hambatan anda dalam melakukan pendampingan terhadap PMB?

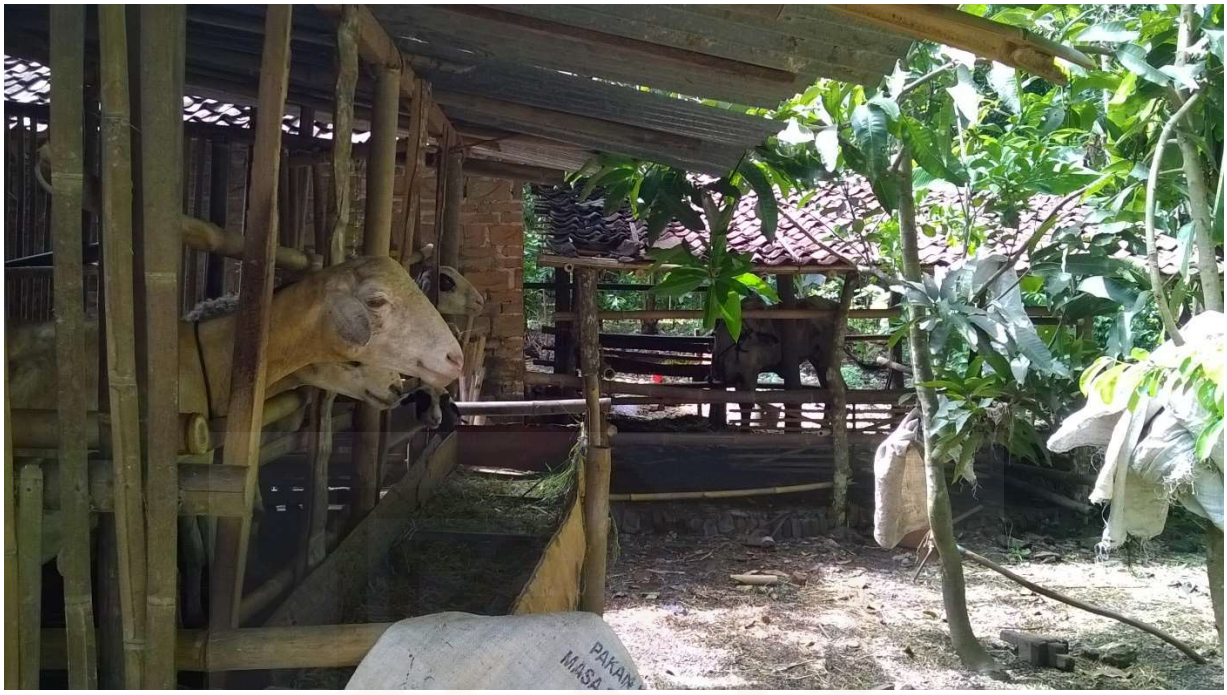


Gambar Usaha penerima layanan dari Dinas Sosial  berupa beternak kambing dan berkembang bertambah sapi.

Gambar Pekerja Migran yang beternak kambing dan berkembang biak semakin banyak.

**INSTRUMEN PENDATAAN PEKERJA MIGRAN BERMASALAH**

1. **IDENTITAS**
   a. Responden
      1) Nama dan Jenis Kelamin :
      2) Tempat, Tgl. Lahir & Umur :
      3) Pendidikan terakhir :
      4) Status, Jumlah anak & saudara :
      5) Agama dan suku bangsa :
      6) Pasport : Ada / tidak ada
      7) Alamat lengkap & No Telp. / HP :

   b. Orangtua / wali/ suami/ istri
      1) Nama orangtua / wali / suami / istri :
      2) Pendidikan terakhir dan pekerjaan :
      3) Alamat lengkap & No Telp. / HP :

2. **PEKERJA MIGRAN BERMASALAH (PMB)**
   **a. LUAR NEGERI DI NEGARA …….**
   **1) Pra penempatan :**

   **Masalah Hukum** : Penipuan, pemalsuan dokumen, jeratan hutang, perampasan dokumen (ijasah, KK, akte kelahiran, dll) pelecehan seksual, pemerasan, penyekapan, merekrut anak di bawah umur, manipulasi hasil tes kesehatan dll.

   Tahun :
   **Masalah pelanggaran hak** : Tidak terpenuhinya hak atas informasi tentang : Job order, biaya penempatan, kontrak kerja, kepastian waktu berangkat dll)

   **2) Penempatan :**

   **Masalah hukum** : Kekerasan fisik, seksual, psikologis, pelanggaran keimigrasian, ancaman pidana berat / hukuman mati, Traficking, Penyelundupan (people smunggling), mempekerjakan anak, deportasi.

   Tahun :
   **Masalah Pelanggaran hak** : Gaji tidak dibayar, tidak ada hari libur (cuti), penyitaan dokumen, tidak ada akses berserikat, tidak ada kebebasan untuk beribadah, tidak ada akses untuk berkomunikasi, tidak ada batasan jam
   Tahun :

   **3) Pasca Penempatan :**
   **Masalah pelanggaran hak** : Adanya eksploitasi ekonomi (penyalahgunaan dari hasil bekerja di LN, perceraian, poligami, Shock Culture

   **b. DOMESTIK, DI ……**
   **1) Pra penempatan :**
   **Masalah PelanggaRn Hak** : Penipuan, pemalsuan dokumen, jeratan hutang, perampasan dokumen (ijasah, kk, akte kelahiran, dll) pelecehan seksual, pemerasan, penyekapan, merekrut anak dibawah umur, manipulasi hasil tes kesehatan dll.
   Tahun :
   **Masalah pelanggaran hak** : Tidak terpenuhinya hak atas informasi ttg : Job order, biaya penempatan, kontrak kerja, kepastian waktu berangkat dll)

   **2) Penempatan :**

   **Masalah hukum** : Kekerasan fisik, seksual, psikologis, pelanggaran keimigrasian, ancaman pidana berat / hukuman mati, Trafiking, Penyelundupan (people smunggling), mempekerjakan anak, deportasi.

   Tahun :
   **Masalah Pelanggaran hak** : Gaji tidak dibayar, tidak ada hari libur (cuti), penyitaan dokumen, tidak ada akses berserikat, tidak ada kebebasan untuk beribadah, tidak ada akses untuk berkomunikasi, tidak ada batasan jam
   Tahun :

   **3) Pasca Penempatan :**
   **Masalah pelanggaran hak** : Adanya eksploitasi ekonomi (penyalahgunaan dari hasil bekerja di LN, perceraian,

poligami, Shock Culture

**3. STATUS SOSIAL EKONOMI**

a. Status kepemilikan rumah :
- ☐ Milik Sendiri
- ☐ Menumpang dengan orangtua/ keluarga
- ☐ Dikontrakkan / disewakan

b. Luas lantai bangunan tempat tinggal :
- ☐ < 8 m2 / orang
- ☐ 8 m2 / orang
- ☐ > 8 m2 / orang

c. Jenis lantai bangunan :
- ☐ Tanah/ bambu/ kayu murahan
- ☐ plester seman
- ☐ Ubin / keramik

d. Jenis dinding tempat tinggal :
- ☐ Anyaman bambu/papan kualitas rendah/tembok non plester
- ☐ Tembok dengan plester
- ☐ Papan kualitas baik

e. Fasilitas kamar mandi dan WC :
- ☐ Tidak punya
- ☐ Bersama rumah tangga lain
- ☐ Milik pribadi

f. Sumber penerangan rumah tangga :
- ☐ Lampu teplok / lilin/ petromak
- ☐ Listrik PLN
- ☐ Listrik Genset
- ☐ Listrik menyambung dari rumah tangga oranglain

g. Sumber air minum :
- ☐ Sumur/ sungai
- ☐ Air PDAM
- ☐ Air Galon / pikulan/ beli eceran

h. Bahan bakan untuk masak :
- ☐ Kayu / arang
- ☐ Gas LPG
- ☐ Minyak tanah

i. Konsumsi daging / susu :
- ☐ Tidak pernah / 1 minggu sekali
- ☐ 2 hari sekali
- ☐ Setiap hari

j. Pembelian pakaian baru 1 tahun :
- ☐ Tidak pernah / 1 kali dalam 1 tahun
- ☐ 6 bulan sekali
- ☐ 3 bulan sekali

k. Makan sehari anggota keluarga :
- ☐ 1 Kali dalam sehari
- ☐ 2 kali dalam sehari
- ☐ 3 kali dalam sehari

l. Total penghasilan keluarga sebulan :
- ☐ < Rp. 600.000,-
- ☐ Rp. 600.000,- s.d Rp. Rp. 1.500.000,-
- ☐ > Rp. 1.500.000,-

m. Jumlah orang yang bekerja mencari nafkah dalam keluarga :
- ☐ 1 orang
- ☐ 2 orang

☐ 3 orang

n. pendidikan tertinggi kepala keluarga : ☐ Tidak sekolah/tidak tamat SD
☐ Tamat SD/SMP
☐ Tamat SMA

o. Kepemilikan asset/tabungan/TV/ motor/ mobil : ☐ Tidak punya asset/tabungnan
☐ Memiliki Asset/ tabungan Rp. 500.000,- s.d. Rp. 1.000.000,-
☐ Memiliki Asset/ tabungan lebih dari Rp. 1.000.000,-

p. Status kependudukan : ☐ Memiliki KTP sesuai domisili
☐ Memiliki KTP tidak sesuai domisili
☐ Memiliki KTP musiman
☐ Tidak memilikin KTP/KK

**4. PENGELUARAN RUMAH TANGGA ( JENIS PENGELUARAN YANG DIBAYAR 1 BULAN DAN 12 BULAN TERAKHIR)**

| NO | JENIS PENGELUARAN | PENGELUARAN 1 BULAN TERAKHIR | PENGELUARAN 12 BULAN TERAKHIR |
|---|---|---|---|
| 1. | Biaya Pengeluaran Konsumsi | Rp. …… | Rp. …… |
| 2. | Biaya Perumahan dan Pemeliharaan | Rp. …… | Rp. …… |
| | a. Sewa, Kontrak rumah | Rp. …… | Rp. …… |
| | b. Rekening ( Listrik, gas, telepon, minyak tanah, air dll.) | Rp. …… | Rp. …… |
| 3. | Pengeluaran Pajak | Rp. …… | Rp. …… |
| | a. Pajak Bumi dan Bangunan | Rp. …… | Rp. …… |
| | b. Pajak Kendaraan | Rp. …… | Rp. …… |
| | c. Pajak Pendapatan | Rp. …… | Rp. …… |
| | d. Pajak Lainnya | Rp. …… | Rp. …… |
| 4. | Pengeluaran barang dan Jasa kebutuhan rumh tangga | Rp. …… | Rp. …… |
| | a. Family kit ( sabun mandi, shampo, detergen/ sabun cuci, | Rp. …… | Rp. …… |
| | kosmetik dll.) | Rp. …… | Rp. …… |
| | b. Jasa (Voucer Hp, pembuatan KTP, SIM, benda pos) | Rp. …… | Rp. …… |

Yogyakarta,

Responden, Petugas Pendata,

( ) ( )

Catatan petugas pendata / uraian tentang catatan kasus dan rekomendasi :

# Daftar Riwayat Hidup

## Identitas Diri

| | |
|---|---|
| Nama | : Ah. Sholahuddin |
| TTL | : Pati, 11 April 1992 |
| Alamat | : Ds. Pasucen RT.03 RW. 03, Kec. Trangkil, Kab. Pati, Jawa Tengah |
| Nama Ayah | : Sudirlan |
| Nama Ibu | : Asmi'ah |
| E-mail | : Lahuddin37@gmail.com |
| No. HP | : 08997881838 |

## Latar Belakang Pendididkan

| | |
|---|---|
| Pendidikan Sekolah Dasar | : MI Misbahul Ulum Pasucen |
| Lokasi | : Pati, JawaTengah, Indonesia |
| Tahun Lulus | :2004/2005 |
| Pendidikan Sekolah Menengah Pertama | : MTs. Misbahul Ulum Pasucen |
| Lokasi | : Pati, JawaTengah, Indonesia |
| Tahun Lulus | :2007/2008 |
| Pendidikan Sekolah Menengah Atas | : MA. Misbahul Ulum Pasucen |
| Program Studi | : Ilmu Pengetahuan Sosial |
| Lokasi | : Pati, JawaTengah, Indonesia |
| Tahun Lulus | : 26 April 2010 |

## Pendidikan Non-Formal

1. Nalam Lembaga Kursus : Happy English Course 1, Pare-Kediri
   Tahun : 2010
2. Nama Lembaga Kursus : Kresna English Language Institute, Pare-Kediri
   Tahun : 2010

Yogyakarta, 1 Juni 2016

Ah. Sholahuddin